



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Siaran Pers nomor: 13/HumasPMK/II/2017

Menko PMK Puan Maharani: “Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai dilaksanakan di 2017”

Jakarta (02/02) – “Saat ini Draft Perpres tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah secara Non Tunai sudah disiapkan untuk mendapatkan persetujuan Presiden”, demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) di Ruang Rapat Utama Lantai 7 Kementerian Koordinator Bidang {Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Rapat bertujuan untuk membahas persiapan pelaksanaan BPNT, sekaligus memastikan penyalurannya terlaksana dengan baik, selain mempercepat beberapa hal yang membutuhkan penyelesaian dan tindak lanjut yang segera. BPNT merupakan konversi sebagian dari program Beras Sejahtera (Rastra).

“Penyaluran BPNT akan segera efektif saat Perpres telah ditetapkan oleh Presiden. Terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPNT yang akan dilaksanakan pada akhir Februari ini, setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) agar mengantisipasi pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” tegas Menko PMK.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) 26 April 2016 lalu, disampaikan bahwa seluruh Bantuan Sosial atau Bantuan Pemerintah harus dalam bentuk Non Tunai dan terintegrasi dalam satu kartu sehingga pemerintah mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

“Tindak lanjut dari arahan Presiden tersebut, Menko PMK telah melaksanakan beberapa kali Rakor berjenjang sejak tingkat teknis eselon I hingga Tingkat Menteri, terakhir pada 8 November 2016 lalu”, ungkap Puan Maharani.

Diterangkannya, pemerintah secara maksimal akan memastikan tahapan persiapan dan pelaksanaan BPNT berjalan dengan lancar. Pada tahap persiapan, Pemerintah *concern* pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk tahap awal ada di 45 Kota dan 6 Kabupaten dengan jumlah 1,4 Juta KPM yang data nama dan alamatnya bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT). Selain itu, dengan asumsi rasio 1 e-Warong layani 150 KPM, maka dibutuhkan sekitar 10.753 unit e-Warong.

Hadir pada RTM antara lain : Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa, Gubernur BI Agus Martowardojo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan Darmansyah Hadad, Sekretaris TNP2K Bambang Widiyanto serta perwakilan Kementerian PPN/ Ka. Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM.

Bagian Humas dan Perpustakaan
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter @KemenkoPMK